

ABSTRAK

Permasalahan utang-piutang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis. Untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara mengajukan Permohonan PKPU dengan alasan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo. Terhadap permohonan PKPU, debitur harus mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor dengan maksud restrukturisasi utang. Rumusan Masalah: Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi bagi kreditor separatis? dan Apakah akibat hukum putusan pembatalan perdamaian terhadap debitur separatis dalam Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst ? Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dimana data penelitian dianalisa secara kualitatif. Rencana perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan oleh para pihak yaitu debitur dan kreditor. Perdamaian dalam PKPU sangat memerlukan peran dari Kreditor separatis karena tanpa perannya maka perdamaian sulit untuk berjalan terutama apabila jaminan kebendaan yang menjadi jaminan kreditor separatis merupakan sarana pemenuhan perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian dalam PKPU. Keberadaan Kreditor separatis sangat penting dalam terlaksananya Perjanjian Perdamaian. Apabila perjanjian perdamaian dibatalkan, maka kreditor separatis dapat menggunakan kembali haknya untuk mengeksekusi objek.

Kata Kunci : Kreditor Sparatis, Perjanjian Perdamaian, PKPU

ABSTRACT

The problem of receivables often occurs in business activities. For completion can be done by applying for PKPU on the grounds that the debtor cannot continue the payment of his debt that is due. Against the pkpu application, the debtor must submit a peace plan to the creditors with the intention of restructuring the debt. Problem Formulation: How do the binding powers of peace agreements that have been politicized for separatist creditors? and What are the legal consequences of the decision to annul the peace against separatist debtors in Decree No. 03/Pdt.Sus-Annulment of Peace/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Number 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ? Research method used is a type of normative research that is descriptive analyst by using a document study data collection tool sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, where the research data is analyzed qualitatively. The peace plan that has been ratified (dihomologasi) becomes the law that must be implemented by the parties, namely debtors and creditors. Peace in the PKPU requires the role of separatist creditors because without its role, peace is difficult to run especially if the material guarantee that becomes the guarantee of separatist creditors is a means of fulfilling the peace agreement. Peace treaty in the PKPU. The existence of separatist creditors is very important in the implementation of the Peace Treaty. If the peace agreement is annulled, separatist creditors may reus their right to execute objects.

Keywords : Peace Treaty, PKPU, Sparatis Creditors.